

REKOMENDASI

Royal Investium Sekuritas

IHSG diperkirakan memiliki batas *support* kemungkinan berkisar 6.300-6.350. Seirama dengan prediksi tersebut, laju IHSG memang berpotensi masih melemah pada pekan ini. Sebab, pada pekan lalu IHSG gagal bertahan dalam level 6.470.

Akhir pekan lalu, IHSG ditur-
tup melemah 74,888 poin (minus
1,16%) hingga berada dalam level
6.383,068. Senada, secara mingguan,
IHSG juga tercatat menurun 1,8% dari
level 6.499,88 pada minggu sebelumnya.
Namun demikian, data BEI menun-
jukkan, *average price to earning (PE) ra-*
tio IHSG masih berada dalam 15,3 kali
hingga akhir pekan lalu. Sementara,
nilai kapitalisasi pasar BEI mencapai Rp
7.258,43 triliun dan pencapaian rata-rata
nilai transaksi harian pekan lalu menyen-
tuh Rp 10,26 triliun.

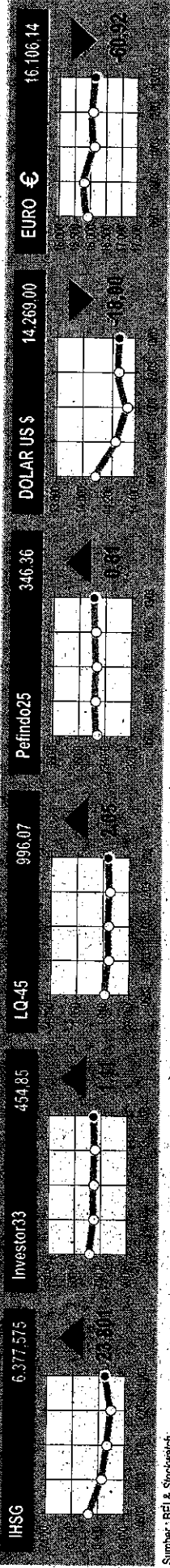
BNI Asset Management Yakin Dana Kelolaan Naik Hingga 20%

JAKARTA - PT BNI Asset Management optimistis mampu meraih peningkatan total dana kelolaan (*assets under management/AUM*) sebesar 10-20% pada 2019. Tahun lalu, manajer investasi ini membukukan total AUM sebesar Rp 16,9 triliun.

Sekretaris Perusahaan BNI Asset Management Harry Yulianty menyatakan, perseroan cukup yakin dengan peluang perkembangan industri reksa-dana pada 2019. Karena itu, pihaknya mematok pening-
katan AUM target kisaran 10-20% sepanjang tahun ini.

"Kami mungkin akan menambah beberapa produk dasar, misalnya reksa dana saham dan reksa dana terproteksi. Kemudian, perseroan juga masih berencana untuk men-
jajaki peluncuran produk alternatif investasi," ujar Yulianty kepada *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (13/3).

Dia mengakui, perseroan berminat mem-
buat produk alternatif investasi, seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan dana investasi infrastruktur (Dinfra). Namun,



Sumber: BEI & Stockwatch

Waskita Karya Siapkan PUB Obligasi Rp 5 Triliun

Oleh Devie Kania

▶ JAKARTA - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berencana mengajukan izin penerbitan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) IV senilai total Rp 5 triliun. Perseroan berniat membiayai kembali (*refinancing*) obligasi sebesar Rp 2 triliun.

Direktur Keuangan dan Strategis Waskita Karya Harris Gunawan mengatakan, pihaknya memutuskan tidak memanfaatkan sisa plafon PUB-III yang izinnya diperoleh pada 2017. Sebaliknya, perseroan akan mengajukan dan merilis obligasi melalui PUB baru.

"Kami tidak melanjutkan sisa PUB-III, karena memilih mengajukan PUB baru senilai Rp 5 triliun," ujar Harris kepada *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (13/3).

Dia menegaskan, Waskita Karya masih melanjutkan pembicaraan dan penawaran struktur obligasi kepada sejumlah perusa-
haan sekuritas. Adapun perseroan berencana



BNI
Asset Management

momentum yang tepat.
"Niat masih ada, tapi kami tetap perlu melihat kondisi yang. Cuma produk alternatif investasi memang sangat menarik, tidak hanya memberikan tingkat pengembalian investasi (*return*) yang baik bagi investor, tapi juga memberikan kesempatan perolehan margin yang prospektif bagi manajer investasinya," jelas dia.

Sebelumnya Direktur Utama BNI Asset Management Reita Farianti mengemukakan, pihaknya berminat untuk menulis Dinira berupa kontrak investasi kolektif (KIK) atau KIK-Dinira. Aset dasar untuk KIK-Dinira yang direncanakan, kajiannya terkait dengan anak-usaha dari badan usaha milik negara (BUMN).

Namun, tahun lalu, Reita juga mengakui, persoalan mungkin akan fokus dulu dengan produk reksa dana yang regular dibandingkan produk alternatif investasi. "Tahun ini belum dulu soal itu, kami fokus dulu dengan produk regular sambil melihat kondisi pasar," papar dia.

Sementara itu, Yulianty menyatakan bahwa pada 2019 peluncuran produk baru BNI Asset Management akan lebih banyak dilakukan menjelang akhir kuartal II-2019. Namun, pada kuartal I ini, persoalan justru lebih fokus dengan rencana penambahan mitra untuk penjualan reksa dana, baik dari perbankan ataupun perusahaan *financial technology* (Fintech).

Dia menjelaskan, peningkatan kerja sama merupakan hal utama yang cukup penting, karena manajer investasi dapat memanfaatkan jaringan atau kemampuan mitra untuk menjangkau investor reksa dana yang lebih luas. Misalnya itu, akses lebih luas kepada nasabah prioritas di perbankan maupun masyarakat generasi milenial melalui *Fintech*.

Sejauh ini, menurut Yulianty, persoalan sudah menggandeng 12 rekanan agen penjual efek reksa dana (APERD). "Dalam waktu dekat, kami juga akan menambah rekanan dari perusahaan *Fintech*," papar dia.

Adapun untuk pencapaian AUM tahun lalu yang senilai Rp 16,9 triliun, Yulianty mengakui, terdapat koreksi jika dibandingkan posisi Rp 19,4 triliun pada akhir 2017. Hal tersebut, antara lain karena faktor pasar dan jatuhnya sejumlah produk reksa dana terproteksi BNI Asset Management.

Program Literasi

Mulai tahun 2019, Yulianty menyampaikan, BNI Asset Management akan lebih menggiatkan program literasi dan inklusi yang lebih sistematis kepada kalangan mahasiswa dan kelompok komunitas. Sebab, harapannya, akan semakin banyak masyarakat yang mengenal dan tertarik dengan industri reksa dana.

"Kami tidak hanya mengenalkan produk, tapi yang utama persoalan juga mengenalkan profesi dan industri ini," tegas dia.

Pada 13 Maret lalu, persoalan pun baru mengundang mahasiswa jurusan akuntansi dari President University di Jababeka, Cikarang untuk berkeliling kantor BNI Asset Management dan mengikuti kelas pengenalan reksa dana. Kelas tersebut diisi oleh tim BNI Asset Management dan salah satu rekan APERD dari manajer investasi ini. (dka)

kupon *floating rate* dan *zero coupon*.
"Sejauh ini, kami masih berminat menjejaki keuangannya, baik obligasi *zero coupon* ataupun *floating rate*," papar dia.

Sebelumnya, Haris pernah mengemukakan, pihaknya kemungkinan akan merilis obligasi menjelang akhir semester I-2019. Tahun ini, persoalan menganggarkan belanja modal (*capital expenditure/capex*) senilai Rp 25,3 triliun. Waskita Karya pun berencana mengalang dana eksternal untuk memenuhi kebutuhan 60-70% dari anggaran *capex* atau ekuivalen Rp 15,18-17,71 triliun. Salah satunya melalui perbitan obligasi.

Namun, Waskita Karya juga berniat menggunakan sebagian dana hasil emisi obligasi untuk merealisasikan program *refinancing* utang obligasi. Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan, PUB II tahap I tahun 2016 Waskita Karya yang senilai Rp 2 triliun akan jatuh tempo pada 10 Juni 2019. Saat merilis PUB II tahap I tahun 2016, Waskita Karya memberikan kupon 9,25% per tahun kepada investor. Struktur obligasi persoalan yang akan jatuh tempo merupakan jenis *straight bond* dengan satu seri dan bertenor tiga tahun.

Analyst fixed income PT MNC Sekuritas I Made Adi Saputra pernah menyatakan, surat utang dengan jenis *zero coupon* atau *floating rate* cukup tepat menjadi sumber dana bagi perusahaan yang menjalankan pembangunan proyek jangka panjang. Contohnya, Waskita Karya yang juga tengah fokus membangun infrastruktur, termasuk jalan tol.

Namun, dia menjelaskan, penerbitan *zero coupon bond* dan *floating rate* tidak lantas membuat biaya dana korporasi lebih rendah. Sebaliknya, instrumen tersebut dapat membantu penerbit untuk menyesuaikan sumber dana dengan pendapatan yang baru akan diterima saat pengerjaan proyek selesai.

Pada 2010, Made memaparkan, PT Jasa

Program Kelas Reksadana & Office Tour BNI AM

Presiden Direktur PT BNI Asset Management (BNI-AM) Reita Farianti dan Direktur Business Dev BNI AM Donny S. Adji serta Investment & Operation Director BNI AM Putut Egoro Andanawati menerima kunjungan mahasiswa President University dalam Program Kelas Reksadana & Office-Tour ke kantor BNI AM di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Marga Tbk (JSMR) pernah merilis obligasi *zero coupon* dan surat utang tersebut sudah jatuh tempo pada 2013. "Saat itu, Jasa Marga menerbitkan *zero coupon bond* dengan ketentuan diskontokan 77,0062% dan jika ditung untuk disejajarkan dengan obligasi senior biasa itu terlihat setara dengan tingkat kupon 9,1%," jelas dia kepada *Investor Daily*.

Di samping itu, Made menginformasikan, PT Pegadaian merupakan salah satu contoh korporasi yang pernah merilis obligasi *floating rate*. Sejauh ini obligasi *floating rate*, terbagi menjadi surat utang dengan batas berjangka yang sudah ditetapkan maupun dengan/batas bawah yang belum ditetapkan.

Adapun, korporasi dapat menggunakan batas *Bi-7 days (reverse) repo rate* di tambah angka tertentu untuk contoh obligasi *floating rate* dengan jenjang yang sudah ditetapkan di awal.

"Jadi, saat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik, penerbit obligasi bisa mendapatkan biaya dana yang lebih tinggi. Sementara, biaya dana penerbit bisa turun jika suku bunga acuan BI dipangkas," ungkap Made.

Kinerja Waskita

Pada akhir 2018, Waskita Karya meraup laba bersih sebesar Rp 3,96 triliun, naik 2,06% dari posisi sebelumnya Rp 3,88 triliun. Sementara itu, total pendapatan persoalan juga tumbuh 7,92% dari Rp 45,21 triliun menjadi Rp 48,79 triliun.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Shastia Hadiarti menyampaikan, persoalan meraih peningkatan pendapatan dan laba

berkat bertepatan kontrak, penerimaan pembayaran atas proyek, maupun pembayaran dana talangan tanah.

Pada 2018, persoalan meraih Rp 36,75 triliun dari hasil pembayaran atas proyek Waskita Karya juga menyasar total pendapatan Rp 54,3 triliun dan laba bersih senilai Rp 4,1 triliun.

WOMFinance
a member of PT Wahana Otomitra Tbk

PT WAHANA OTOMITRA MULTIARTHA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wahana Otomitra Multiartaha Tbk ("Perseroan") yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 telah memutuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2018 sebesar Rp 18,5 (delapan belas koma lima Rupiah) per saham atau 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2018 sebesar Rp 64.554.702.879,9 (enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan Rupiah).

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Surat Kabar dan di Lantai Bursa Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) pada: - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	Kamis, 14 Maret 2019 Rabu, 20 Maret 2019 Jumat, 22 Maret 2019
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Ex Dividen) pada: - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	Kamis, 21 Maret 2019 Senin, 25 Maret 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen Tunai (Recording Date)	Jumat, 22 Maret 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	Jumat, 12 April 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Pembentahan ini merupakan pembentahan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pembentahan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recorded date*) pada tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Abs Pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri), adalah sebagai berikut:
 - Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 28 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia, berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenaikan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk pemanfaatan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/61/PJ/2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/24/PJ/2010 dan PER/62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/25/PJ/2010 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/114/PJ/2009 tertanggal 15 Desember 2009 yang mengaharuskan Wajib Pajak Luar Negeri untuk menyampaikan formulir DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak, Perusahaan Pajak, Perusahaan Masuk Bursa kepada: KSEI (untuk pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) paling lambat tanggal 22 Maret 2019.Tanpa adanya formulir dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

Jakarta, 14 Maret 2019
PT Wahana Otomitra Multiartaha Tbk
Direksi

PT Wahana Otomitra Multiartaha Tbk | Alitra Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sumter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk
Jakarta Utara 14350, Indonesia